

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) bertujuan untuk memperbaiki demokrasi daerah serta mewujudkan implementasi sistem demokrasi dalam menghasilkan pemimpin yang bermutu dan berkualitas. Politik dinasti merupakan fenomena politik dimana munculnya aktor-aktor politik dari lingkungan keluarga atau lingkup kerabat dekat kepala pemerintahan yang sedang berkuasa.

Politik dinasti di negara maju seperti Kennedy, Clinton, dan Bush di Amerika Serikat, Bismarck di Jerman, Hatoyama di Jepang, Lee di Singapura, Springs di Inggris pada umumnya terjun ke dunia politik setelah melewati fase pengkaderan politik¹. Baik pengkaderan di dalam *internal* keluarga maupun pengkaderan *eksternal*, seperti melalui jalur aktivisme dan juga jalur partai politik. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kekuasaan selanjutnya.

Pada umumnya status askriptif atau dapat diartikan juga dengan hubungan, kerap ditonjolkan dibandingkan prestasi, seperti Gandhi di India, Soekarno di Indonesia, Aquino dan Marcos di Filipina, Kim di KoreaUtara².

¹Wasisto Raharjo Djati, 'Revivalisme Kekuatan *Familisme* dalam Demokrasi: Politik dinasti di Aras Lokal', Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2013

² *Ibid*

Pada hakikatnya politik dinasti tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan masyarakat monarki, di mana pada sistem monarki kekuasaan sudah jelas akan jatuh pada putra mahkota dalam kerajaan tersebut³.

Politik dinasti di Indonesia sebenarnya merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, padahal dalam prakteknya politik dinasti secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih di dalam permainan perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dalam politik dinasti yang berkembang adalah patrimonial, artinya kekuasaan hanya berputar-putar di lingkungan keluarga saja. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan. Dengan cara menempatkan keluarga atau kerabat sang penguasa pada pos-pos tertentu, baik itu dalam bidang formal (Pemerintahan) maupun dalam bidang informal (Proyek atau Bisnis).

Secara demokratis pemilihan langsung dilaksanakan dengan bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun pada akhir-akhir ini di beberapa daerah dalam pemilihan kepala daerah banyak dimanfaatkan oleh penguasa daerah dengan mempergunakan "Politik Dinasti". Bila diamati, politik dinasti dapat menghambat proses regenerasi politik karena arus kekuasaan untuk menentukan suatu kebijakan yang hanya berputar pada satu tempat atau kaderisasi politik dalam keluarga pemegang kekuasaan⁴. Berkembangnya politik dinasti dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintah daerah.

³ Wasisto Raharjo Djati, '*Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Politik Dinasti di Aras Lokal*', Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2013

⁴ *Ibid*

Karena masyarakat hanya disodori pilihan terhadap aktor-aktor politik yang itu-itu saja berasal dari satu keluarga dan menerapkan pola perilaku politik sama⁵. Peraturan yang lemah untuk memangkas politik dinasti juga menjadi penyebab meluasnya politik dinasti. Hal tersebut menjadikan lemahnya fungsi *check and balance* sehingga berdampak pada tindakan korupsi dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya.

Politik dinasti yang terdapat di masyarakat tingkat pendidikan rendah, sistem hukum lemah dan pelembagaan politik belum mantap maka politik dinasti dapat berarti negatif⁶. Dampak negatif politik dinasti adalah terbukanya peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dan juga dapat merusak tatanan birokrasi di daerah karena birokrasi dijadikan alat untuk menompang kepentingan politik dinasti serta menurunnya kualitas demokrasi ditingkat lokal.

Indikasi munculnya politik dinasti di Indonesia pertama kali terjadi pada orde baru yaitu masa kepemimpinan Soeharto, dalam hal ini politik dinasti memiliki berbagai bentuk. Misalnya saja politik dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten, nama Atut sudah tak asing lagi karena sering diingat sebagai sosok pemimpin yang lumrah mempraktekkan politik dinasti saat ia menjabat sebagai Gubernur Banten.

Saat menjalankan kekuasaannya sejumlah kerabatnya menduduki sejumlah posisi strategis di Instansi Pemerintahan. Seperti adik

⁵ Wasisto Raharjo Djati, '*Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Politik dinasti di Aras Lokal*', Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2013

⁶ Suyadi, '*Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*', Program Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

kandungnya bernama Ratu Tatu Chasanah pernah menjabat Wakil Bupati Serang (2010-2015) dan berlanjut menjadi Bupati Serang (2016-2021). Ada juga adik tiri Atut bernama Tubagus Haerul Jaman yang pernah menjabat sebagai Walikota Serang (2011-2018). Ipar Atut juga cukup dikenal, Airin Rachmi Diany menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan (2011-2021).⁷

Dinasti yang dibangun oleh Atut tidak berhenti disitu saja, ia terus membangun dinasti dan telah direncanakannya, terlihat dari nama-nama anggota keluarga Atut terus bermunculan di dalam dunia politik. Anak Atut bernama Andika Hazrumy bahkan berhasil menjadi Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Istri Andika, Hj. Adde Rosi Khoerunnisa juga tak jauh dari panggung politik ia merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Banten 2014-2019 dari fraksi partai Gerindra⁸.

Selain politik dinasti Atut, politik dinasti Fuad Amin Imron atau Lora Fuad di Bangkalan, Madura menjadi cerita lain. Fuad Amin Imron menjabat sebagai Bupati Bangkalan selama 10 tahun atau dua periode (2003-2013). Menariknya, pada 2003 saat Fuad mencalonkan diri sebagai Bupati sementara masih menjabat anggota DPR RI, ia pernah dikaitkan dalam kasus pemalsuan ijazah dan diusut Polri, meski akhirnya kasus itu

⁷(<https://www.google.com/search?q=Dinasti+Politik+di+Jambi&oq=Dinasti+Jamb&aqs=chrome.69i57j0i22i30.9226j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 30 Agustus 2020 Pukul 23.10 WIB)

⁸(<https://Asumsi.co/Post/Perjalanan-Panjang-Politik-Dinasti-di-Indonesia> diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 01.20 WIB)

hilang begitu saja⁹. Memasuki masa akhir kepemimpinannya, nama putra Fuad yakni Makmum Ibnu Fuad alias Ra Momon justru muncul menjadi kandidat kuat pengganti Fuad sebagai orang nomor satu di Bangkalan. Saat itu Ra Momon yang baru berusia 26 tahun menjabat ketua DPRD Bangkalan¹⁰.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Jambi, tepatnya pada masa pemerintahan Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin pertama kali menjadi Gubernur Jambi pada tahun 1999 meski sempat diragukan oleh masyarakat Jambi. Namun pada akhirnya Zulkifli Nurdin berhasil meyakinkan semua orang Jambi bahwa Jambi akan baik-baik saja dibawah kepemimpinannya.

Mulai dari menguasai partai PAN, menarik aktivis 98 untuk menjadi staff pribadinya, merangkul hampir seluruh perwakilan etnis di Jambi, menempatkan sanak keluarga dan orang terdekatnya pada jabatan strategis, hingga merangkul Pers Jambi. Sehingga tak heran ketika pada 2005 Zulkifli kembali terpilih menjadi Gubernur Jambi dengan angka yang begitu mencolok persentase diatas 70%¹¹.

Setelah memimpin Jambi selama dua periode, Zulkifli mewariskannya kepada anaknya Zumi Zola. Pada tahun 2015 Zumi Zola mencalonkan diri menjadi Gubernur Jambi, keikutsertaannya ke ranah politik Jambi seperti reinkarnasi dari sosok ayahnya sendiri. Zumi menang dengan selisih 18% suara dari HBA pada pemilihan 2015. Namun pada

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ (<https://Kumparan.com/Naik-ketek/Zulkifli-Nurdin-Zumi-Zola-dan-Politik-Dinasti-di-Jambi/Full>, diakses pada 02 September 2020 pukul 15.10 WIB)

tahun 2018, Zumi Zola terjerat kasus korupsi ketok palu RAPBD Jambi pada tahun 2017 dan menetapkan empat anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka lainnya.

Selain anaknya yang ikut terjun ke dunia politik, Ratu Munawaroh ibu dari Zumi Zola ternyata ikut maju pada Pilgub Jambi 2020 mencalonkan diri sebagai Wagub Jambi melalui partai PAN, sosok Ratu Munawaroh ini bukan orang asing di Jambi¹². Jejak karier politiknya pun ada karena ia merupakan mantan anggota DPR RI tahun 2009. Tidak hanya sampai sana saja, anak keempat dari Zulkifli Nurdin yakni Zumi Laza. Ia mewarisi darah politik sang ayah, Laza terpilih menjadi ketua DPD PAN Kota Jambi secara aklamasi. Bahkan partai PAN sempat menetapkan Laza untuk maju Pilwako Jambi 2018, namun pada 2017 Laza mendadak mengundurkan diri sebagai ketua DPD PAN Kota Jambi dengan alasan melanjutkan S2 di Kanada¹³.

Hal ini juga terjadi di Kota Sungai Penuh sudah terlihat sejak tahun 2011. Pada saat itu kepemimpinan berada dibawah tangan Asafri Jaya Bakri (AJB) sebagai Walikota yang telah menjabat selama dua periode berturut-turut. Memasuki periode kedua putranya menjabat sebagai ketua DPRD Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 ia maju menjadi calon Walikota dan akan

¹² <https://Jambi.Tribunnews.com/2020/06/16/Siapa-Sebenarnya-Ratu-Munawaroh-Cek-Jejak-Karier-Ibu-Zumi-Zola-Maju-Pilgub-Jambi-2020?page=4>, diakses pada 03 September 2020 pukul 19.55 WIB)

¹³ <https://Kumparan.com/Kumparannews/Kenalkan-Zumi-Laza-Adik-Zumi-Zola-yang-Aktif-di-Dunia-Politik/Full>, diakses pada 03 September 2020 pukul 20.24 WIB)

melawan pasangan Ahmadi-Antos, yang sebelumnya pernah mencalonkan diri namun kalah dari AJB.

Selain itu ada putri bungsunya yang juga ikut terjun ke dunia perpolitikan, dan bahkan sekarang ia menduduki kursi DPRD Provinsi Jambi serta memperoleh suara signifikan pada Pemilu 2019 lalu dari partai Demokrat. Selain anaknya yang terjun ke dunia politik, istri dari AJB yaitu Emizola juga ikut untuk merambah ke dunia politik. Hal ini dapat dilihat dari kedudukannya sebagai ketua DPD Nasdem Kota Sungai Penuh. Sedangkan AJB merupakan ketua majelis pertimbangan partai Demokrat.

Tidak hanya anak dan istrinya yang ikut ke dunia politik, kerabat AJB juga mendapat bagian untuk memegang jabatan penting dalam Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Di mana besan AJB berkedudukan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh. Sedangkan menantunya memegang jabatan sebagai Kepala Bidang di Instansi Kota Sungai Penuh dan juga ada adik kandungnya serta sepupunya yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Tabel.1

Jabatan politik dan jabatan struktural yang dijabat oleh keluarga

Asafri Jaya Bakri

Nama	Jabatan	Hubungan
Asafri Jaya Bakri	Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2021	Ayah
Emi Zola	Ketua DPD Partai Nasdem Kota Sungai Penuh 2019	Istri Walikota Kota Sungai Penuh
Fikar Azami	Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2017-2019	Anak Walikota Kota Sungai Penuh
Ezzaty	Anggota DPRD Prov. Jambi Tahun 2019-2024	Anak Walikota Kota Sungai Penuh
Dr. Hadiyandra	Kadis Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2017	Besan Walikota Kota Sungai Penuh
Dedi Wahyudi	Kadis BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2017	Sepupu dari istri Walikota Kota Sungai Penuh
Paunal Akhyar	Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, Politik Kota Sungai Penuh Tahun 2018	Adik kandung dari Walikota Kota Sungai Penuh
Pada Oloan Siregar	Kabid Perbendaharaan Bakeuda Tahun 2019	Menantu dari Walikota Kota Sungai Penuh

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Sungai Penuh

Implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan atau suatu keadaan terlibat maupun sesuatu yang memiliki hubungan keterlibatan¹⁴. Keterlibatan dimaksud dapat seperti kepentingan umum, kelompok, maupun kepentingan pribadi. Kata implikasi dapat menggambarkan sebuah bentuk politik dinasti dalam berkuasa melibatkan peran keluarga, kerabat serta kroninya dalam menempatkan dan menjalankan politik pemerintahannya.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka hal tersebut juga berlaku pada keluarga AJB. Di mana semasa pemerintahannya beliau banyak melibatkan keluarga serta kerabatnya dalam mengisi jabatan-jabatan strategis dalam politik dan struktural. Ia menempatkan menantu, besan hingga ponakannya dalam jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Sehingga masyarakat Sungai Penuh menilai bahwa AJB sedang membangun politik dinasti dalam masa pemerintahannya.

Melihat hal ini membuat Walikota Sungai Penuh menjadi buah bibir masyarakat Sungai Penuh terlebih terhadap aktivis-aktivis Sungai Penuh, mereka sangat menentang politik dinasti yang sedang dibangun oleh AJB. Mereka menilai dapat merugikan masyarakat. Terlebih dalam masa kepemimpinan AJB belum berjalan secara optimal sesuai dengan program yang ada dan ditambah lagi adanya kasus-kasus korupsi oleh

¹⁴ (<https://Kbbi.web.id/Implikasi>, diakses pada tanggal 05 September 2020 pukul 19.15 WIB)

pejabat daerah sehingga menjadi sorotan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, aktivis maupun masyarakat jeli terhadap kasus tersebut¹⁵.

Namun kenyataannya dalam Pilwako Sungai Penuh 2020, Fikar Azami putra dari Walikota Sungai Penuh tidak berhasil memenangkan kompetisi. Dari hasil penghitungan suara dalam pemilihan tersebut Fikar-Yos tertinggal dari lawan politiknya yaitu pasangan Ahmadi-Antos.

Berkurangnya pengaruh dinasti ini karena masyarakat telah meleak terhadap politik, adanya demokrasi yang maju dan masyarakat sudah mulai selektif dalam memilih pemimpin berikutnya, masyarakat mengharapkan ada suatu perubahan baik kedepannya untuk kemajuan daerah.

Adapun yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan tema adalah skripsi oleh Ilham Ramadhan yang berjudul Politik Dinasti di Aceh (studi kasus Kabupaten Nagan Raya). Penelitian ini menjelaskan mengenai politik dinasti di Aceh pada masa kepemimpinan H. Teuku Zulkarnaini. Ia telah memenangkan dua kali Pilkada di Kabupaten Nagan Raya, dalam masa kepemimpinannya ia telah membangun politik dinasti dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan penting di pemerintahannya. Tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui strategi politik dinasti H. Teuku Zulkarnaini, dan juga dampak negatif dan positif dari politik dinasti H. Teuku Zulkarnaini¹⁶.

¹⁵ <https://www.JambiSeru.com/Berita/Daerah/2019/13/08/Tokoh-SungaiPenuh-Sepakat-Hadang-Dinasti-AJB>, diakses pada tanggal 06 September 2020 pukul 11.36 WIB)

¹⁶ Ilham Ramadhan, *Politik Dinasti Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)*, Skripsi FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018

Selanjutnya jurnal oleh Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana yang berjudul Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. Membahas mengenai sumber daya material masih menjadi dominan dalam dinamika politik di Desa Sitimerto, selain itu juga ada sumber daya non-material yang lebih dapat menjamin kemenangan di pemilihan. Tujuan penelitian tersebut untuk melihat hal yang sangat berpengaruh sebagai sumber daya dalam kemenangan Pilkades¹⁷.

Selanjutnya jurnal oleh Zaldy Rusnaedy, Titin Purwaningsih dengan judul Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Penelitian tersebut membahas tentang keikutsertaan keluarga dari pertahana ini dalam Pilkada. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seperti apa pengaruh dari modalitas yang mendominasi sehingga dapat menjadi kekuatan bagi kandidat itu sendiri¹⁸.

Diantara 3 penelitian tersebut, yang dapat membedakan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh dari modalitas calon kandidat sebagai kekuatannya dalam Pilkada, serta sumber daya material maupun non-material yang

¹⁷ Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana, *Praktek Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016*, Jurnal FISIP UNAIR, Volume 4, 2018, Halaman 124-151

¹⁸ Zaldy Rusnaedy, Titin Purwaningsih, *Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015*, Jurnal Univ. Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia, Volume 3, 2018

menjadi dominan serta dapat menjamin kemenangan dalam pemilihan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai implikasi kekuasaan Asafri Jaya Bakri dalam praktek nepotisme pada jabatan politik dan jabatan struktural di Kota Sungai Penuh dan fenomena penyebab berkurangnya pengaruh nepotisme Asafri Jaya Bakri di Kota Sungai Penuh

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari peneliti adalah :

- a. Bagaimana implikasi kekuasaan Asafri Jaya Bakri dalam praktek nepotisme pada jabatan politik dan jabatan struktural di Kota Sungai Penuh?
- b. Apa fenomena penyebab praktek nepotisme Asafri Jaya Bakri di Kota Sungai Penuh mulai berkurang pengaruhnya?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implikasi penyebab praktek nepotisme Asafri Jaya Bakri di Kota Sungai Penuh mulai berkurang pengaruhnya.
- b. Untuk menemukan fenomena penyebab praktek nepotisme Asafri Jaya Bakri di Kota Sungai Penuh mulai berkurang pengaruhnya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai bentuk implikasi penyebab praktek nepotisme Asafri Jaya Bakri di Kota Sungai Penuh mulai berkurang pengaruhnya

b. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam kajian tentang fenomena praktek nepotisme, serta memberikan alternatif informasi tentang praktek nepotisme. Serta dapat menjadi sumber bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik terhadap politik dinasti dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan praktis mengenai bagaimana bentuk praktek nepotisme.

1.5 Landasan teori

1.5.1 Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku¹⁹. Kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Pengertian mengenai kekuasaan menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan dari seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan mempengaruhi

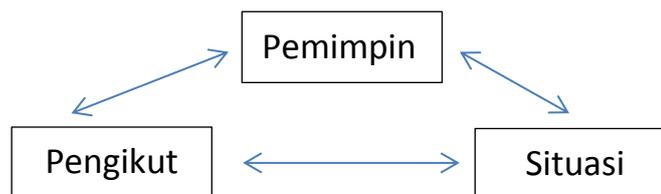
¹⁹ Budiarjo, Mariam “Pengantar Ilmu Politik”, 2015

perilaku seseorang atau kelompok lain untuk mengikuti sesuai keinginan pemegang kekuasaan.

Pendekatan ini, banyak terpengaruh oleh sosiologi. Lebih luas ruang lingkungannya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer²⁰. Kekuasaan berfokus pada cara untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan serta menjalankan kekuasaan atau mempengaruhi perilaku atas orang lain. Kekuasaan politik dan tujuan politik saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain.

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan memengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya, komponen ini saling berkaitan dalam roda kehidupan penguasa²¹.

Perhatikan gambar dibawah ini.



Pada gambar diatas menjelaskan, pemimpin sebagai pemilik kekuasaan dapat menciptakan dan memengaruhi pengikutnya untuk mempertahankan kekuasaan atau menjatuhkan kekuasaan. Pemimpin

²⁰ *Ibid hal 17-18*

²¹ Holifah Nur, Politik Dinasti: Studi Kasus Kemenangan Dinasti Samidin Dalam Pilkades di Desa Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang. *Undergraduate Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2016

juga dapat menciptakan situasi yang dapat menguntungkan sang pemimpin, dalam hal ini figur pemimpin cerdas diperlukan dalam memperhitungkan situasi diciptakannya.

1.5.2 Teori Oligarki

International Encyclopedia of Social Sciences mendefinisikan *oligarki* sebagai “bentuk pemerintahan kekuasaan politik ada ditangan minoritas kecil,” dan istilahnya berasal dari kata Yunani *oligarkhia* (pemerintahan oleh yang sedikit)²². Namun pada pengertian tidak memadai mendefinisikan oligarki. Dikarnakan masih menimbulkan kekaburan dalam memaknai oligarki itu sendiri. Oligarki tidak merujuk pada segala tindakan politis yang dilakukan oligark dengan uang dan kekuasaannya. Tidak jarang oligark mengerahkan sumber daya materialnya diberbagai isu dan pertarungan politik yang menjadi perhatiannya namun tidak berhubungan langsung dengan pertahanan kekayaan dan oligarki²³.

Bagi Jeffrey A. Winters, oligarki bukan semata-mata kekuasaan politik di tangan minoritas kecil elit-elit politik, namun mengalami penyempitan makna ke arah spesifik. Winters memahami oligarki sebagai pemusatan kekuasaan segelintir elit, terutama elit pemegang kekayaan. Berdasarkan pemahaman oligarki dikemukakan

²² Jeffrey A. Winter, *Oligarki*. hlm.1, 2011

²³ Jeffrey A. Winter, *Oligarki*. hlm.11, 2011

Winters muncul istilah oligark, yaitu aktor elit oligarki di negara dengan kekayaan yang besar²⁴.

Perpolitikan Indonesia, melalui partai oligarki menentukan siapa yang jadi pilihan, rakyat akan memilih melalui demokrasi. Tidak menutup kemungkinan politik uang dalam partai akan menentukan siapa terpilih, fenomena ini diperparah oleh hukum tebang pilih. Dengan ungkapan lain, demos dalam politik praktis itu bukanlah rakyat, melainkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses ke dalam kratos (pemerintahan), entah itu elite pada umumnya atau pada khususnya²⁵.

Tentang kemana demokratisasi akan bergerak sering kali tidak dapat ditentukan secara *a priori* lewat teori-teori. Kutipan dari Giorgio Agamben berikut mengacu pada kondisi lapangan yang menentukan arah politik :

Misteri politik bukanlah kedaulatan melainkan pemerintahan; bukan Allah melainkan para malaikat-Nya; bukan raja melainkan para menteri-Nya; bukan hukum melainkan polisi atau lebih baik; mesin ganda pemerintahan yang dibentuk dan jalankan²⁶.

Semua yang disebut pertama – kedaulatan, Allah, raja dan hukum dapat menjadi bintang penuntun perjalanan, tetapi perjalanan itu sendiri merupakan hasil ‘kekuatan-kekuatan bawah’ dapat

²⁴ Fajar Kuala N, ‘Pemilukada: Menguatnya Oligarki Lombok Timur Tahun 2013

²⁵ F. Budi Hardiman, Dalam Moncong Oligarki. hlm.25, 2013

²⁶ F. Budi Hardiman, Dalam Moncong Oligarki. hlm.26, 2013

menghasilkan arah menyimpang²⁷. Jika tanpa adanya pengawasan dari kekuatan-kekuatan masyarakat, maka politis ini justru akan mempermudah formasi di dalam oligarki tersebut. Seperti pembahasan Kroef (1960) bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan praktek demokrasi lebih cenderung oligarki. karena Kepala Desa tidak dipilih melainkan ditentukan berdasarkan keturunan atau dipilih hanya dari kalangan terbatas saja, terutama elit ekonomi yang memiliki aset seperti tanah²⁸. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan apakah ada proses demokrasi di Desa atau hanya kekuasaan segelintir orang yang ikut terlibat di Desa sebagai aktor oligarki.

Melihat dari kekuatan, peran pengusaha dalam Pilkada sangat kuat. Kekuatan ekonomi sangat berperan dalam penentuan kepala daerah. Pengusaha mampu mengontrol dan mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan kepentingan pribadinya²⁹. Dengan mendapatkan kekuasaan politik maka hal tersebut dapat mempermudah penguasa dalam mengarahkan setiap kebijakannya untuk kepentingan pengusaha maupun kepentingan pribadi penguasa.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana, 'Praktek Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016', Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, 2018

²⁹ Diana Faudhiah, 'Oligarki Politik : Pertemuan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Politik di Nagan Raya', Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, 2019

Menguatnya politik dinasti akibat adanya implikasi politik dan bisnis. Munculnya politik dinasti tersebut dapat menghambat kader yang memiliki kualitas dan dinilai memiliki basis kecerdasan serta rekam jejak baik.

1.5.3 Teori Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tetap berada dipihaknya dengan mewariskan kekuasaan atau memberi sebagian kekuasaan dimiliki kepada keluarganya. Terdapat pula pengertian positif dan negatif tentang politik dinasti. Negatif dan positif tersebut tergantung pada proses dan hasil (*outcomes*) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan politik dinasti bersangkutan³⁰.

Jika proses pemilihannya dapat adil dan demokratis maka kepemimpinan itu dapat mendatangkan kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka politik dinasti dapat berarti positif. Akan tetapi, bisa berarti negatif jika terjadi sebaliknya.

Politik dinasti dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan *concern* yang

³⁰ Novendra Bimantara, 'Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri', Program Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang, 2018

sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi politik dinasti ini adalah kekuasaan³¹.

Politik dinasti merupakan strategi untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada dipihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan tersebut kepada orang yang mempunyai ikatan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan penguasa kerap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.

Dikotomi antara politisi dan demokrasi banyak di negara berkembang, tampaknya sulit untuk direalisasikan kesejatiannya. Karena politisi tidak hanya berperan sebagai aktor pembuat kebijakan, tetapi juga melakukan penetrasi pada gelandangan kerja birokrasi³².

Selain itu, terdapat tiga alasan dinasti politik terus berkembang atau laku di Indonesia. Burhanuddin menyebut alasan pertama, sebab tidak ada larangan dinasti politik ikut pemilu, kedua, lemahnya pelembagaan partai sehingga brand keluarga lebih penting ketimbang partai. Ketiga, pemilih juga tidak terlalu anti-dinasti. Selain itu, hal ini bertemu dengan nafsu kekuasaan yang ingin bertahan

³¹ *Ibid*

³² Leo Agustino, 'Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi' Jurnal Administrasi Publik, 2014

selama mungkin. Ia juga menyebut terdapat dampak positif dan negatif adanya dinasti politik.

Dari sisi positif antara lain dinasti politik dianggap sebagai proses mentorship di mana tokoh politik akan menularkan pengalaman dan proses pembelajaran secara langsung kepada anggota keluarganya, seperti yang terjadi di India, Filipina dan Amerika Serikat. Definisi dinasti politik tidak dapat disalahkan sebab tidak ada pasal konstitusi Indonesia yang dilanggar. “Konstitusi tegas menyatakan bahwa setiap warganegara punya hak memilih dan dipilih. Karena itu, pembahasan di DPR terkait UU untuk membatasi dinasti politik harus dilakukan secara hati-hati agak tidak menabrak rambu-rambu konstitusi,” tambahnya.

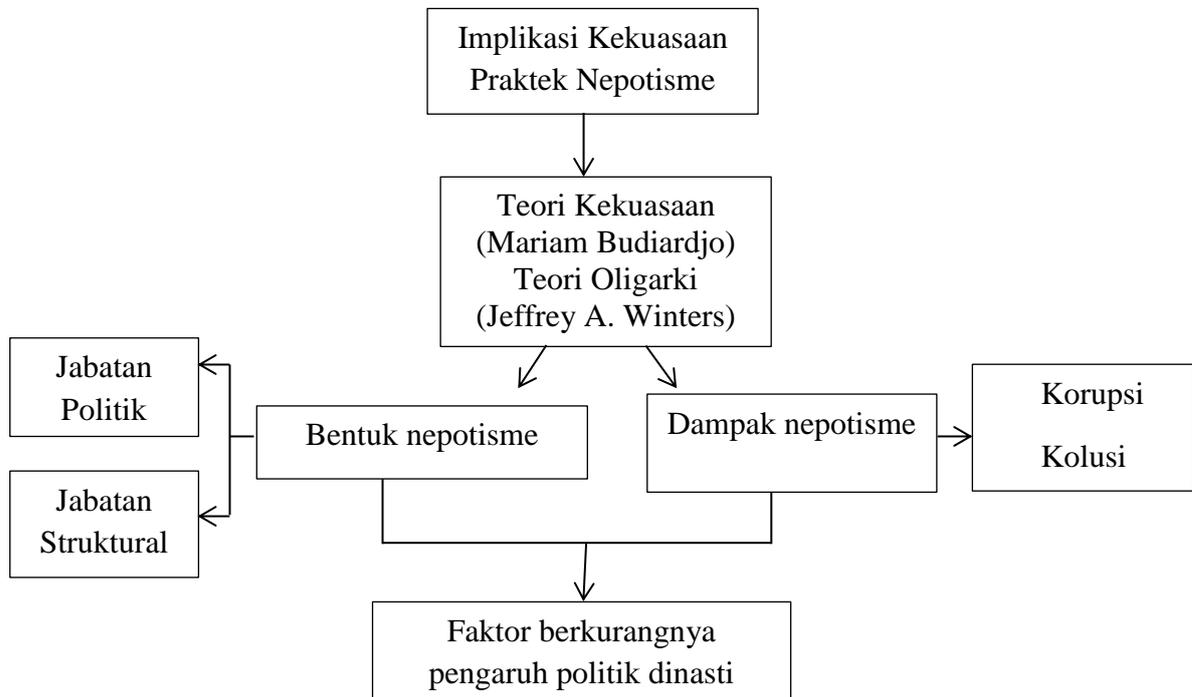
Selain itu, dari sisi negatif, Buhanuddin menyebut dampaknya terdiri atas dinasti politik memakan ongkos yang mahal, praktik dinasti sebagai pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik, proses pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada proses rasionalitas instrumental, namun didasarkan pada keputusan individual dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa, pelembagaan partai politik juga tersumbat karena asas meritokrasi ditundukkan oleh hubungan darah dan hubungan keluarga, serta dinastokrasi juga tidak menawarkan insentif jenjang karir politik yang

jelas bagi kalangan luar yang berintegritas dan punya kapasitas agar bersedia aktif di dalam partai.

Keterlibatan Kepala Daerah dapat dilihat dari menentukan struktur organisasi dan kelembagaan dalam birokrasi, proses rekrutmen, penempatan kerja untuk eselon tingkat atas, mempengaruhi tujuan dan menetapkan keputusan usulan anggaran. Politik kekerabatan ini terjadi baik pada tingkat nasional maupun lokal. Dalam fenomena ini calon kandidat dari keluarga politik hanya mengandalkan popularitas keluarga dan tidak disertai dengan kualitas yang memadai

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran alur pikir dan dipahami sesuai dengan rumusan masalah penelitian, teori, batasan masalah serta definisi operasional dalam bentuk bagan. Berdasarkan uraian di atas kerangka pikir mengenai Implikasi Kekuasaan Asafri Jaya Bakri Dalam Praktek Nepotisme Pada Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Nepotisme adalah bentuk sifat lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan kedekatan. Nepotisme terjadi karena birokrat merekrut aparatur baru bukan berdasarkan nilai kualifikasi melainkan berdasar pada ikatan keluarga atau kekerabatan, berikut bagan kerangka pikir:



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki³³.

³³ (Pengertian Sumber Data, Jenis-jenis Data dan Metode Pengumpulan Data, Alamat Website <https://AchmadSuhaidi.Wordpress.com/2014/02/26/Pengertian-Sumber-Data-Jenis-jenis-Data-dan-Metode-Pengumpulan-Data/>, , 2014, diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 14.55 WIB)

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data berasal dari berbagai *literature*, dokumentasi atau wawancara yang dilakukan kepada sumber utama.

Terkait dengan cara menganalisis antara konsep, kebijakan dan hasil yang ditemukan di lapangan saat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori: Kekuasaan, Oligarki dan Politik Dinasti.

Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dilaksanakan di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Alasan peneliti ingin meneliti ini, untuk mengetahui bentuk implikasi kekuasaan Asafri Jaya Bakri dalam praktek nepotisme pada pemerintahan Kota Sungai Penuh.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian, di mana fokus dari penelitian tersebut adalah bertujuan untuk memfokuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Penentuan fokus didasarkan pada pembaruan informasi diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yaitu memilih pokok permasalahan untuk diteliti. Oleh karenanya peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap implikasi kekuasaan Asafri Jaya Bakri dalam praktek nepotisme pada pemerintahan Kota Sungai Penuh.

1.7.4 Sumber Data

Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Menurut Arikunto, yang

dimaksud sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”.

Untuk memperoleh data penulis menggunakan 2P, yaitu ³⁴:

a) Person

Adalah sumber data yang biasanya memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. sumber data berasal dari hasil wawancara terhadap informan.

b) Place

Adalah sumber data menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah di Kota Sungai Penuh.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Untuk melakukan penelitian ini, berikut beberapa informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatan dengan objek penelitian:

- a) Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh
- b) Pengamat Politik/Akademisi
- c) Tokoh Masyarakat Kota Sungai Penuh
- d) Partai Politik Nasdem Kota Sungai Penuh
- e) Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Sungai Penuh

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2006), hlm 107.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data³⁵.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh Karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis.³⁶

Proses wawancara dilakukan peneliti adalah dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar

³⁵ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, ALFABETA'cv, Oktober 2017

³⁶ *Ibid*

atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.³⁷

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola.

Memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain³⁸. Metode interaktif dalam analisis data ditunjukkan melalui hal-hal berikut³⁹:

a) Reduksi

Data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran *sensitive* yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan.

Transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dalam hal ini dapat dilakukan adalah pengodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

³⁷ *Ibid*, hlm 240.

³⁸ *Ibid*, hlm 244.

³⁹ *Ibid*, hlm 247.

b) Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian peneliti dan dapat memahami apa sesuatu sedang terjadi dan apa sesuatu harus dilakukan.

Kecenderungan kognitif akan menyederhanakan informasi kompleks kedalam bentuk lebih disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi dapat mudah dipahami, polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.

c) Menarik kesimpulan atau verifikasi

Makna-makna dapat muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validasi.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data⁴⁰.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 241.

